

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jum'at, 5 April 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman 4)	Jumat, 5 April 2019	Bappenas Bentuk Financing Hub	Kementerian PPN dan Bappenas segera membentuk financing hub yang bertugas untuk mengoordinasi pembiayaan bagi program Sustainable Development Goals (SDGs). Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, financing hub bagi proyek SDGs ini akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun ini. “Financing hub yang nanti akan mengelola dan mengoordinasikan pembiayaan untuk SDGs. Konsep sudah diluncurkan, sedang kami finalkan,” ungkap Amalia yang akrab dipanggil Winny, Kamis (4/4). Financing hub ini akan mengoordinasikan dana-dana proyek SDGs dari zakat, CSR (corporate social responsibility) perusahaan, filantropi, crowdfunding, dan lain sebagainya. Selain dana swasta, financing hub SDGs ini akan mengoordinasi APBN, serta pembiayaan lewat swasta dan pemerintah diantaranya Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
2	Bisnis Indonesia (Halaman 9)	Jumat, 5 April 2019	DKI Komitmen Lanjutkan Pembebasan Lahan	Pemerintah Provinsi DKI terus melakukan koordinasi dengan keberlanjutan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Kali Sunter.
3	Bisnis Indonesia (Halaman 28)	Jumat, 5 April 2019	Tol Trans Jawa Pacu Kendaraan Niaga	Industri kendaraan bermotor niaga diproyeksikan bergairah seiring dengan beroperasinya jalur tol Trans Jawa yang membuka peluang bagi moda angkutan jalan raya menjadi primadona.
4	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jumat, 5 April 2019	Perusahaan Kebut Pembebasan Lahan	Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways Thorry Hendranto mengatakan bahwa progress pembangunan jalan tol itu hingga pertengahan Februari 2019 telah mencapai 50,51%. Pembangunan jalan tol sepanjang 34,80 kilometer yang menjadi bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 tersebut dijadwalkan rampung pada akhir 2019. Pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional dibagi menjadi 4 seksi, yaitu seksi 1 Simpang Susun (SS) Cibitung-SS Telaga Asih (3,14 kilometer), Seksi 2 SS Telaga Asih-SS Tambelang (10,30 kilometer), seksi 3 SS Tambelang-SS Tarumajaya (14,30 kilometer), dan seksi 4 SS Tarumajaya-SS Cilincing (7,10 kilometer). Progress pengerjaan seksi 1 telah mencapai 61,70% dan seksi 2 mencapai 60,30%. Menurut Thory, kedua seksi tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2019 dan diupayakan bisa digunakan secara fungsional untuk pemudik yang ingin melintasi jalan ini menjelang Lebaran. “Masih diupayakan, saat ini masih mengejar pembebasan lahan, “ ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (4/4). Saat ini, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) itu juga berupaya membebaskan lahan pada seksi 4 (7,10

				kilometer) dan diharapkan juga pada Juni 2019 bisa rampung.
5	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Jumat, 5 April 2019	Proyek SPAM Dumai Segera Dimulai	PT Adhi Karya Tbk. berharap bisa memulai konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum Dumai, Riau dalam waktu dekat. Proyek dengan kapasitas 450 liter per detik itu merupakan garapan terbaru perseroan di sektor air minum.
6	Kompas (Halaman, 16)	Jumat, 5 April 2019	Target Irigasi 20 Persen Sawah Terus Dikejar	Pembangunan 65 bendungan baru sejak 2015 terus berlangsung. Jika semua selesai dan beroperasi tahun 2022, cakupan pengairan sawah ditargetkan meningkat menjadi 20 persen dari total luas sawah di Indonesia. Saat ini, luas total sawah irigasi di Indonesia mencapai 7,3 juta hektar. Namun, dengan 231 bendungan yang ada, luas sawah yang terairi air bendungan baru 11 persen atau sekitar 800.000 hektar saja. “Dengan menambah bendungan baru, luas sawah teraliri air dari bendungan diharapkan bisa lebih dari 1,4 juta hektar,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang ditemui seusai Dies Natalis ke-5 Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Pembangunan bendungan ini untuk menggenjot produksi dan ketahanan pangan nasional. Dengan menambah bendungan masalah kekeringan diupayakan tertangani. “Juga mendorong agar sawah yang sebelumnya hanya bisa panen setahun sekali, bisa panen dua hingga tiga kali setahun,” ujar Basuki. Pembangunan bendungan dimulai bertahap sejak 2015 dengan membangun 11 bendungan dan menyelesaikan 13 bendungan baru. Tahun ini dibangun 29 bendungan baru.
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 5 April 2019	Segmentasi Lelang Perketat Persaingan	Kalangan konsultan menilai pemberlakuan segmentasi baru dalam paket lelang jasa konsultasi di Kementerian PUPR bakal membuat persaingan kian ketat, terutama di kualifikasi menengah. Wakil Ketua Bidang Pranata Usaha DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Jakarta Ronald Sihombing mengatakan bahwa segmentasi baru memicu peralihan kualifikasi besar ke menengah karena paket untuk kualifikasi besar menyempit. “Situasi di lapangan banyak yang menurunkan grade-nya [ke menengah] sehingga persaingan menjadi keras,” ujarnya kepada Bisnis. Dalam pengadaan jasa konsultasi tahun anggaran 2019, Kementerian PUPR mengubah plafon paket yang bisa diikuti oleh badan usaha. Dalam Surat Edaran Menteri PUPR No. 10/SE/M/2018, segmentasi diubah menjadi kecil, menengah, dan besar dari sebelumnya kecil dan nonkecil. Konsultan dengan kualifikasi kecil bisa mengikuti lelang dengan nilai di bawah Rp1 miliar, sedangkan nilai lelang di kisaran Rp1 miliar sampai dengan Rp2,50 miliar diperuntukkan bagi konsultan kualifikasi menengah. Sementara itu, pekerjaan di atas Rp2,50 miliar menjadi pangsa konsultan besar. Berdasarkan data Kementerian PUPR, paket untuk kualifikasi kecil tahun ini tercatat 1.148 paket atau 42% dari total paket.

8	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 5 April 2019	Berita Foto	Foto udara memperlihatkan deretan baru pemecah ombak di Pantai Padang, Sumatera Barat. Balai Wilayah Sungai Sumatra V Kementerian PUPR membangun batu pemecah ombak untuk mencegah abrasi di sejumlah pantai di provinsi itu diantaranya Kab. Agam, Padangpariaman, Kota Pariaman, dan Padangn dengan anggaran senilai Rp69 miliar selama 2019.
9	Kompas (Halaman, 15)	Jumat, 5 April 2019	Tanggul Laut Tetap Dibangun di Palu	Pemerintah bersikukuh membangun tanggul laut untuk mengantisipasi pasang laut dan tsunami di Teluk Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tanggul laut dinilai opsi terbaik melindungi pesisir, termasuk dari terjangan tsunami. Namun, sejumlah kalangan menolak rencana yang dinilai tak berbasis mitigasi itu. “Tangguk berfungsi sebagai pelindung tebing teluk yang mengalami penurunan. Kami menata pesisir agar wilayah itu tetap bermanfaat, baik secara sosial maupun ekonomi,” kata Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulteng Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto di Palu. Dalam rencana rekonstruksi pascagempa Sulteng, tanggul laut dibangun sepanjang 7 kilometer di pesisir Teluk Palu, tepatnya dari Kelurahan Silae hingga Kelurahan Talise. Tingginya bervariasi, 1,5-3 meter. Tanggul tersebut dibangun dari batu. Belum bisa dipastikan kapan tanggul itu dibangun, tetapi diperkirakan dimulai 2019 ini.
10	Bisnis Indonesia (Halaman 8)	Jumat, 5 April 2019	Jawa Barat Tunggu Peraturan Presiden	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat Linda Al Amin mengatakan, dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu Kantor Staf Kepresidenan (KSP) diputuskan urusan penuntasan masalah sosial ini harus diselesaikan dengan Perpres. “Solusinya ditarik ke atas, karena sesuai aturan karena tidak mungkin (ganti rugi) dibayar dua kali. Karena mencontoh sukses di Jatigede ditarik jadi perpres.” Katanya di Bandung. Menurutnya, persoalan di Waduk Kuningan adalah setelah BBWS Cimanuk Cisanggarung memberikan ganti rugi pada warga terdampak, Pemkab Kuningan mengajukan permohonan relokasi bagi warga yang tidak terdampak. “Kabupaten Kuningan ingin memenuhi tuntutan masyarakat (soal relokasi) tetapi di APBN tidak bisa dipenuhi karena akan terjadi double counting. Sekarang Perpres masih di staf presiden mudah-mudahan bisa selesai cepat,” ujarnya. Sebetulnya, pihak BBWS, menurut Linda, sudah siap memenuhi permintaan tersebut mengingat dana untuk relokasi sekitar 50 kepala keluarga sudah tersedia.

Judul	Bappenas Bentuk Financing Hub	Tanggal	Jumat, 5 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 4)		
Resume	Kementerian PPN dan Bappenas segera membentuk financing hub yang bertugas untuk mengoordinasi pembiayaan bagi program Sustainable Development Goals (SDGs).		

► IMPLEMENTASI SDGS

Bappenas Bentuk *Financing Hub*

Bisnis, JAKARTA — Kementerian PPN dan Bappenas segera membentuk *financing hub* yang bertugas untuk mengoordinasi pembiayaan bagi program *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Adininggar Widayanti mengatakan, *financing hub* bagi proyek SDGs ini akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun ini.

"*Financing hub* yang nanti akan mengelola dan mengoordinasikan pembiayaan untuk SDGs. Konsep sudah diluncurkan, sedang kami finalkan," ungkap Amalia yang akrab dipanggil Winny, Kamis (4/4).

Financing hub ini akan mengoordinasikan dana-dana proyek SDGs dari zakat, CSR (*corporate social responsibility*) perusahaan, filantropi, *crowd-funding*, dan lain sebagainya.

Selain dana swasta, *financing hub* SDGs ini akan mengoordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pembiayaan lewat swasta

dan pemerintah di antaranya Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Tidak hanya mengoordinasi, *financing hub* juga akan membantu mencocokkan (*matching process*) antara pembiayaan dan program SDGs untuk semua indikator.

"Ini jadi *center* untuk inovasi skema pembiayaan baru, kami akan kerja sama dengan mitra pembangunan baru," ujar Winny.

Financing hub ini akan berada di bawah pengawasan Kementerian PPN/Bappenas sebagai penanggung jawab SDGs yang ditunjuk presiden.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan enam SDGs Center bekerja sama dengan enam universitas di dalam negeri, yaitu Universitas Padjadjaran, Universitas Jember, Universitas Bengkulu, Universitas Mataram, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung.

Secara garis besar, implementasi SDGs merupakan program

lanjutan dari MDGs. Di dalam SDGs terdapat 17 *goals* atau tujuan a.l. kemiskinan, kelaparan, kualitas pendidikan, kesetaraan gender, kualitas air bersih, dan sanitasi serta tujuan lainnya.

GANDENG JICA

Pada bagian lain, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan JICA akan memulai fase kedua proyek kerja sama teknis *Strengthening Framework of Implementation of SDGs* di lima provinsi di Indonesia.

Sekretaris Menteri PPN/Bappenas Gellwynn Jusuf mengungkapkan, proyek teknis dalam rangka penguatan program SDGs tersebut akan dimulai pada April 2019 yang direncanakan berlangsung selama 1,5 tahun.

"Kementerian PPN/Bappenas dan JICA telah menyepakati untuk memulai proyek percontohan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, serta 3 provinsi lain yang akan ditentukan saat proyek berjalan," ujar Gellwynn selepas *kick off meeting* di kantor Bappenas, Kamis (4/4).

Proyek ini bertujuan untuk memperkuat kerangka implementasi SDGs dari Pemerintah Indonesia melalui dukungan penentuan indikator domestik, perumusan rencana aksi untuk mencapai indikator tersebut, dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.

Dia berharap JICA dapat membagi pengetahuan dan pengalaman kepada Indonesia. Pasalnya, Indonesia butuh kerja sama, analisis teknologi, dan keterlibatan publik untuk mendapatkan praktik terbaik dalam implementasi SDGs.

Deputi Menteri Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Ketua Tim Pelaksana TPB/SDGs Arifin Rudiyanto menilai kerja sama ini akan menguatkan capaian SDGs hingga 2020.

"Implementasi 17 SDGs pemerintah dan Jepang telah berkomitmen bahwa kerja sama ini menjadi refleksi kedua negara untuk merealisasikan agenda SDGs yang diharapkan bisa teralisasi pada 2030." (Hadijah Alaydrus)

Judul	DKI Komitmen Lanjutkan Pembebasan Lahan	Tanggal	Jumat, 5 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 9)		
Resume	Pemerintah Provinsi DKI terus melakukan koordinasi dengan keberlanjutan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Kali Sunter.		

► NATURALISASI SUNGAI

DKI Komitmen Lanjutkan Pembebasan Lahan

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI terus melakukan koordinasi terkait dengan keberlanjutan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Kali Sunter.

Muhamad Wildan
redaksi@bisnis.com

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Namun, Yusmada mengakui bahwa pembebasan lahan di sekitar sungai bukanlah perkara mudah. "Komitmen tetap ada tetapi pembebasan lahan itu nggak semudah membalikkan tangan. Sungai kita banyak permukiman, itu fakta yang harus kita hadapi," katanya, Kamis (4/4).

Adapun, dalam APBD 2019, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan dana pengadaan tanah sungai dan saluran sebesar Rp500 miliar dan pengadaan tanah untuk waduk, situ, dan embung sebesar Rp350 miliar.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan proses normalisasi sungai di DKI Jakarta terhenti sepanjang 2 tahun terakhir.

Terkait dengan naturalisasi yang dimaksud, Yusmada menerangkan bahwa yang dimaksud dengan naturalisasi adalah pengupayaan penahanan aliran air agar air yang mengalir di sungai sesuai dengan kapasitas sungai.

Pemprov DKI Jakarta pun mengupayakan penambahan waduk, situ, dan embung sebagai penahan air.

Selain berfungsi untuk mencegah banjir yang disebabkan oleh aliran air yang melebihi kapasitas sungai, air yang tertahan juga dapat digunakan sebagai air baku yang dapat diolah menjadi air bersih oleh PD PAM Jaya.

"Naturalisasi itu mengupayakan aliran air ditangkap, ditahan, dan mudah-mudahan jadi air baku," kata Yusmada.

Selain itu, konsep naturalisasi yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta pun juga ikut dibantu dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang difungsikan untuk menampung air atau retarding basin.

Yusmada menerangkan, air hujan yang masuk akan dibiarkan menggenangi di

► Yang dimaksud dengan naturalisasi adalah pengupayaan penahanan aliran air agar air yang mengalir di sungai sesuai dengan kapasitas sungai.

RTH dan secara otomatis akan terserap ke dalam tanah dalam waktu kurang lebih dua jam.

Bahkan, bila perlu air yang turun di atas RTH akan dibendung agar bisa sepenuhnya terserap melalui RTH dan menambah cadangan air tanah DKI Jakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa normalisasi sungai di Jakarta yang menjadi bagian dari penanggulangan banjir di Ibu Kota terhenti sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kegiatan normalisasi sungai yang seharusnya dikerjakan pemerintah pusat berhenti sejak 2 tahun terakhir. Ya, [terhenti] karena tidak ada pembebasan lahan," ujarnya menjawab pertanyaan *Bisnis*, pekan lalu.

Menurut Basuki, pengendalian banjir di Ibu Kota sebetulnya merupakan konsep atau janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Basuki menjelaskan bahwa apabila makna naturalisasi sudah jelas, berarti tidak perlu dilakukan tender dan tinggal Pemerintah Provinsi DKI melaksanakan saja. "Dialokasikan anggarannya melalui sisa tender atau anggaran tahun 2020, tetapi pasti jalan dulu itu konsepnya *multiyears contract*."

Berdasarkan catatan *Bisnis* per Februari 2018, ketika itu, Gubernur DKI Anies Baswedan belum memutuskan untuk melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung meskipun Dinas Tata Air DKI memberi sinyal melanjutkan proyek tersebut. ■

Banjir Masih Terus Mengintai Warga Jakarta

Banjir menjadi momok bagi sebagian penduduk Jakarta. Ketika memasuki musim penghujan, warga Ibu Kota, khususnya di bantaran kali, sudah harus bersiap-siap menghadapi datangnya banjir. Meski banjir datang dan pergi dengan cepat, tetapi frekuensinya bisa berulang. Pemerintah pun membuat sejumlah kebijakan untuk menanggulangi banjir. Sayangnya, proyek itu kini tak berjalan sesuai dengan perkiraan.

Proyek Penanganan Banjir di Jakarta dan Sekitarnya*

► Waduk Ciawi I & Sukamahi • Kebutuhan Lahan: 79 ha dan 13 ha • Kapasitas: 8,8 juta meter kubik dan 2,4 juta meter kubik • Biaya: Rp1,9 triliun • Masa pembangunan: 2 tahun+3 tahun • Kendala: Topografi (tanah lembek), tinggi tanggul tidak maksimal, dan pembebasan lahan, koordinasi antara pemerintah wilayah. ► Sadetan Ciliwung-Cisadane • Panjang 2,9 km • Biaya: Rp1,5 triliun	• Masa pembangunan: 3 tahun • Kendala: Koordinasi dengan Pemprov Banten, pembebasan lahan, koordinasi antara pemerintah wilayah. ► Multiurpose Deep Tunnel • Panjang: 29 km • Kapasitas: 250 meter kubik per detik • Biaya: Rp30 triliun • Masa pembangunan: 50 tahun • Kendala: Tidak layak, pembangunan butuh waktu lama, biaya yang terlalu besar, ditolak oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
--	---

Sumber: Dari berbagai sumber diolah. *Perhitungan awal 2018. BISMUGATV/DG

Judul	Tol Trans Jawa Pacu Kendaraan Niaga	Tanggal	Jumat, 5 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 28)		
Resume	Industri kendaraan bermotor niaga diproyeksikan bergairah seiring dengan beroperasinya jalur tol Trans Jawa yang membuka peluang bagi moda angkutan jalan raya menjadi primadona.		

► INFRASTRUKTUR JALAN

Tol Trans Jawa Pacu Kendaraan Niaga

Bisnis, JAKARTA — Industri kendaraan bermotor niaga diproyeksikan bergairah seiring dengan beroperasinya jalur tol Trans Jawa yang membuka peluang bagi moda angkutan jalan raya menjadi primadona.

Aprianus Dwi Tediak
redaksi@bisnisid.com

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Jongkie D. Sugarto mengatakan, pertumbuhan kendaraan niaga terjadi seiring dengan pertumbuhan infrastruktur. Keberadaan tol Trans Jawa menjadi salah satu indikasi pertumbuhan infrastruktur yang akan memacu segmen kendaraan niaga.

"Peluang tumbuh tetap ada. Salah satu pendorongnya adalah pengembangan infrastruktur jalan. Namun secara jumlah, akan relatif sama dengan tahun lalu," ujarnya, belum lama ini.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat sepanjang 2018 produksi sasis truk mencapai 284.480 unit dan sasis bus 3.460 unit.

Produksi sasis truk naik 21,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 233.219 unit. Setali tiga uang, produksi sasis bus juga tumbuh 38,40% dari sebelumnya 2.500 unit.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo) Kyatnaja Lookman menilai porsi produksi kendaraan niaga jalan tol harus lebih ditingkatkan. Pasalnya, para pengusaha truk ada kemungkinan akan mulai lebih banyak memanfaatkan jalan tol sebagai jalur pengiriman muatan.

"Terhubungnya tol Trans Jawa juga

► **Terhubungnya tol Trans Jawa juga membuka peluang bagi pengusaha logistik dan angkutan lainnya untuk memanfaatkannya.**

► **Terjadi peningkatan penumpang 20% untuk angkutan jalan. Adapun yang menurun adalah penumpang pesawat.**

membuka peluang bagi pengusaha logistik dan angkutan lainnya untuk memanfaatkannya. Jadi, porsi produksi truk jalan tol seharusnya lebih ditingkatkan dibandingkan dengan truk berat [seperti truk tambang]," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (4/4).

Beberapa produsen mulai melirik potensi truk jalan raya setelah tol Trans Jawa terkoneksi. Salah satunya adalah Scania melalui program #ScaniaTun-satunya.

General Manager United Tractor Hari-rjadi Mawardi mengatakan, terkoneksi-nya jalan tol Trans Jawa menjadi alasan Scania meluncurkan empat produk sasis yakni sasis bus (Scania K360IB-4X2 dan K410IB-6X2) dan dua sasis truk (R560-A6x4 dan P360-A6x4).

"Saat ini Scania masih bermain di segmen truk *mining* atau *off-road*. Kalau *on-road* baru mulai lagi sejak jalan tol [Trans Jawa] terhubung," ujarnya di Bekasi, Selasa (3/4).

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menilai kebutuhan truk domestik seharusnya masih dapat dipenuhi oleh para produsen. Dia berpatokan pada kapasitas produksi kendaraan secara keseluruhan baru dimanfaatkan 55%-60%. Hal tersebut juga termasuk segmen kendaraan niaga.

"Kemudian kami lihat perkembangan ekonomi. Untuk kendaraan komersial yang mengalami perkembangan adalah di sektor pengiriman barang atau logistik yang mana banyak memanfaatkan kendaraan pikap. Namun, secara umum produksi kendaraan niaga jenis lainnya juga masih tercukupi," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (4/4).

PINTU KEBANGKITAN

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan bahwa tol Trans Jawa menjadi pintu gerbang dari kebangkitan angkutan

Tumbuh Signifikan



Penjualan kendaraan tipe truk dan bus sepanjang tahun lalu tumbuh signifikan. Beroperasinya jalur tol Trans Jawa diproyeksikan akan membuat pasar kendaraan komersial makin bergairah, karena infrastruktur ini diyakini membuka peluang bagi moda angkutan jalan raya menjadi primadona.

Perbandingan waktu tempuh dari tarif angkutan antarmoda

Keterangan		Bus	Kereta Api	Pesawat
Jakarta-Semarang	Tarif Tiket	Rp170.000	Rp300.000	Rp532.000
	Waktu Tempuh	6 jam	6 jam	1 jam 5 menit
Jakarta-Solo	Tarif Tiket	Rp20.000	Rp370.000	Rp598.000
	Waktu Tempuh	7 jam	8 jam 30 menit	1 jam 15 menit
Jakarta-Surabaya	Tarif Tiket	Rp285.000	Rp470.000	Rp818.000
	Waktu Tempuh	10 jam	9 jam	1 jam 30 menit

Sumber: Kemendhub

Bisnis/Anas Hidayat

jalan.

"Terjadi peningkatan penumpang 20% untuk angkutan jalan. Yang menurun adalah [penumpang] pesawat. Alasannya, harga mahal, waktunya relatif sama ditambah ada kemungkinan *delay*," ujarnya, Selasa (2/4).

Dia memaparkan perbandingan moda angkutan antarkota. Dengan tol Trans

Jawa, perjalanan Jakarta-Semarang hanya butuh waktu 6 jam dengan bus atau sama dengan kereta api, dan waktunya sekitar 1 jam dengan jalur udara atau pesawat.

Namun, ongkos bus jauh lebih murah yakni Rp170.000, ongkos kereta api Rp370.000, dan pesawat Rp532.000.

Kemudian, perjalanan Jakarta-Solo

hanya membutuhkan waktu 7 jam, jauh lebih singkat dibandingkan dengan moda kereta api yang membutuhkan waktu 8,5 jam.

Adapun tarif tiket angkutan bus hanya Rp200.000, kereta api mencapai Rp370.000, dan pesawat terbang memakan waktu 1 jam, dan biayanya mencapai Rp598.000. ■

Judul	Perusahaan Kebut Pembebasan Lahan	Tanggal	Jumat, 5 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways Thorry Hendranto mengatakan bahwa progress pembangunan jalan tol itu hingga pertengahan Februari 2019 telah mencapai 50,51%.		

► JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING

Perusahaan Kebut Pembebasan Lahan

Bisnis, JAKARTA — PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways masih melakukan pembebasan lahan agar konstruksi jalan tol Cibitung—Cilincing dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Krisia R. Kharati
krisia.putri@bids.com

Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways Thorry Hendranto mengatakan bahwa progress pembangunan jalan tol itu hingga pertengahan Februari 2019 telah mencapai 50,51%.

Pembangunan jalan tol sepanjang 34,80 kilometer yang menjadi bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 tersebut dijadwalkan rampung pada akhir 2019.

Pembangunan jalan tol Cibitung—Cilincing yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional dibagi menjadi 4 seksi, yaitu seksi 1 Simpang Susun (SS) Cibitung—SS Telaga Asih (3,14 kilometer), Seksi 2 SS Telaga Asih—SS Tambelang (10,30 kilometer), seksi 3 SS Tambelang—SS Tarumajaya (14,30 kilometer), dan seksi 4 SS Tarumajaya—SS Cilincing (7,10 kilometer).

Progres pengerjaan seksi 1 telah mencapai 61,70% dan seksi 2 mencapai 60,30%. Menurut Thorry, kedua seksi tersebut ditargetkan selesai pada Juni 2019 dan diupayakan bisa digunakan secara fungsional untuk pemudik yang ingin melintasi jalan ini menjelang Lebaran.

"Masih diupayakan, saat ini masih mengejar pembebasan lahan," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (4/4).

Saat ini, badan usaha jalan tol (BUJT) itu juga berupaya membebasan lahan pada seksi 4 (7,10 kilometer) dan diharapkan juga pada Juni 2019 bisa rampung.

Thorry menyebutkan bahwa perusahaan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian PUPR, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pembebasan lahan. Secara keseluruhan, progress pembebasan lahan kini telah mencapai 76%.

"Pembebasan lahan masih kurang [sekitar] 23% lagi," ujarnya.

Jalan tol Cibitung—Cilincing dibangun dengan biaya investasi Rp10,80 triliun.

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways mendapat pinjaman sejumlah Rp7,40 triliun dari sindikasi perbankan untuk membiayai proyek ini.

BUJT itu dimiliki oleh PT Waskita Toll Road dan PT Pelabuhan Indonesia II dengan porsi kepemilikan saham masing-

► Secara keseluruhan, progress pembebasan lahan jalan tol Cibitung—Cilincing telah mencapai 76%.

► Progres pembangunan jalan tol Krian—Legundi—Bunder—Manyar telah mencapai 70,50%.

masing 55% dan 45%.

Sebelumnya, Thorry menerangkan bahwa konstruksi jalan tol Cibitung—Cilincing sebagian besar menggunakan tiang pancang atau *pile slab*. Akibatnya, biaya konstruksi pun meningkat 15% dibandingkan dengan perhitungan awal.

Menurutnya, persoalan menggunakan tiang pancang karena pada trase jalan tol banyak ditemui tanah lunak hingga kedalaman 12 meter. Konstruksi *at grade* atau timbunan tanah, lanjutnya, akan berisiko jika dilakukan pada struktur tanah lunak.

Selain tanah lunak, metode tiang pancang juga dipilih karena pada trase jalan tol berhimpitan dengan jalur pipa gas.

Konstruksi dengan tiang pancang, lanjutnya, dilakukan pada seksi 2 dan seksi 3 sepanjang 25,10 kilometer.

Sementara itu, konstruksi dengan tim-

bunan tanah hanya sepanjang 7,30 kilometer. Perusahaan juga menggunakan konstruksi melayang sejauh 2 kilometer di seksi 1.

TOL KRIAN—MANYAR

Pada bagian lain, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat melansir bahwa progress pembangunan jalan tol Krian—Legundi—Bunder—Manyar di Jawa Timur telah mencapai 70,50%. Tiga seksi jalan tol ini dijadwalkan beroperasi pada 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa panjang keseluruhan tol Krian—Legundi—Bunder—Manyar adalah 38,40 kilometer. Operasional jalan tol ini diproyeksi bisa mengatasi kepadatan lalu lintas di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

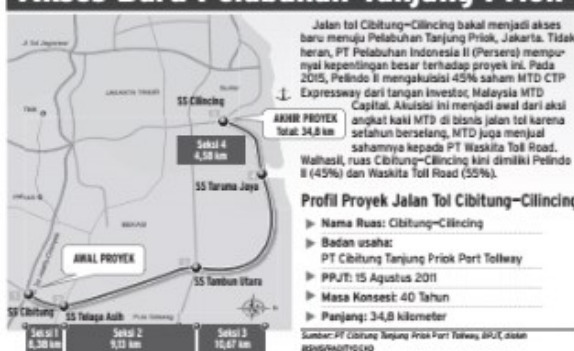
"Jalan tol ini terutama memperlancar distribusi yang dapat mengurangi biaya logistik secara ekonomis," ujarnya melalui siaran pers, Kamis (4/4).

Berdasarkan seksi, jalan tol itu terbagi menjadi seksi 1 (Krian—Kadamean Mengganti), seksi 2 (Kadamean Mengganti—Boboh), seksi 3 (Boboh—Bunder), dan seksi 4 (Bunder—Manyar). Seksi 1 hingga seksi 3 dijadwalkan beroperasi pada September 2019, sedangkan seksi 4 menyusul pada Agustus 2020.

Direktur Utama PT Waskita Bumi Wira Herwidiarto mengatakan bahwa total investasi pembangunan jalan tol tersebut mencapai Rp12 triliun. Perseroan baru saja mendapatkan pinjaman dari perbankan sebesar Rp5,36 triliun yang digunakan untuk konstruksi seksi 1, 2, dan 3.

"Progres pembebasan lahan sudah 99% dan rata-rata untuk tiga seksi progress fisiknya 75%," ujarnya. (Rivki Maulana) [E]

Akses Baru Pelabuhan Tanjung Priok



Judul	Proyek SPAM Dumai Segera Dimulai	Tanggal	Jumat, 5 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	PT Adhi Karya Tbk. berharap bisa memulai konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum Dumai, Riau dalam waktu dekat. Proyek dengan kapasitas 450 liter per detik itu merupakan garapan terbaru perseroan di sektor air minum.		

► PROYEK AIR MINUM

Proyek SPAM Dumai Segera Dimulai

Bisnis, JAKARTA — PT Adhi Karya Tbk. berharap bisa memulai konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum Dumai, Riau dalam waktu dekat. Proyek dengan kapasitas 450 liter per detik itu merupakan garapan terbaru perseroan di sektor air minum.

Direktur Keuangan PT Adhi Karya Tbk. (ADHI) Entus Asnawi mengatakan bahwa perseroan bersama dengan PT Adaro Tirta Mandiri telah ditetapkan sebagai pemenang tender SPAM Dumai pada Januari 2019.

Perseroan kini mempersiapkan pembentukan anak usaha yang akan menjadi badan usaha pelaksana (BUP) di proyek tersebut.

"Mestinya sih, sudah bisa jalan ya, [sebelum Juni 2019] karena kapasitasnya juga tidak terlalu besar sehingga bisa mulai [konstruksi] dengan ekuitas dulu," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (4/4).

Menurut Entus, total investasi

yang dibutuhkan untuk pembangunan SPAM Dumai mencapai Rp489 miliar. Pendanaan untuk proyek ini bakal bersumber dari pinjaman sebesar 70% dan 30% dari ekuitas BUP.

Di BUP ini, ADHI memegang porsi saham 51%, sedangkan 49% dimiliki Adaro Tirta Mandiri.

Entus mengungkapkan bahwa sejumlah calon kreditur siap memberi pinjaman untuk pembangunan SPAM Dumai.

Oleh karena itu, pemenuhan pembiayaan atau *financial close* diestimasi bisa berjalan dalam waktu dekat.

SPAM Dumai akan memanfaatkan sumber air dari Sungai Mesjid di Kelurahan Bukit Timah, Kota Dumai. SPAM ini bakal menambah jumlah pelanggan sebanyak 20.300 sambungan rumah. Proyek ini diestimasi rampung pada 2024.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, proyek SPAM Dumai menambah portofolio Adhi Karya di

sektor air minum.

Sebelumnya, BUMN karya itu mengakuisisi 25% saham EBD Paragon Singapore Pte. Ltd. di PT Perusahaan Air Indonesia Amerika. Perusahaan ini beroperasi di Lombok Tengah.

SPAM KARIAN BARAT

Sementara itu, ADHI juga tengah mempertimbangkan untuk mencari sumber air baku baru dalam pengusahaan SPAM Karian Barat di Banten.

Semula, proyek SPAM ini akan mengandalkan sumber air baku dari Bendungan Karian.

Entus mengatakan bahwa pembangunan SPAM untuk wilayah Cilegon dan Serang bisa menggunakan sumber air baku dari Bendungan Sindangheula yang progres pembangunan fisiknya lebih maju ketimbang Bendungan Karian. Per Maret 2019, progres konstruksi Bendungan Sindangheula telah mencapai 98%.

"Ini kan mau selesai ben-

dungannya. Jadi, bisa ambil [air baku] dari Sindangheula untuk SPAM ke arah Barat," jelasnya.

Sebagaimana dilansir dari Pusat Bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Bendungan Sindangheula dibangun sejak 2015 dengan biaya Rp496 miliar. Air dari bendungan ini bisa dimanfaatkan untuk irigasi maupun air baku sebanyak 1.600 liter per deti (lpd).

SPAM Karian Barat direncanakan memiliki kapasitas 1.000 lpd. ADHI sebelumnya melansir bahwa perseroan akan menggandeng mitra lokal di proyek ini.

Sementara itu, di SPAM Karian Timur, Adhi Karya sudah menggandeng mitra dari Korea Selatan, yaitu K Water.

Entus menerangkan bahwa saat ini status dari proyek SPAM Karian Barat maupun Karian Timur masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan.

(Rivki Maulana)

Judul	Target Irigasi 20 Persen Sawah Terus Dikejar	Tanggal	Jumat, 5 April 2019
Media	Kompas (Halaman, 16)		
Resume	Pembangunan 65 bendungan baru sejak 2015 terus berlangsung. Jika semua selesai dan beroperasi tahun 2022, cakupan pengairan sawah ditargetkan meningkat menjadi 20 persen dari total luas sawah di Indonesia.		

INFRASTRUKTUR BENDUNGAN

Target Irigasi 20 Persen Sawah Terus Dikejar

MAGELANG, KOMPAS — Pembangunan 65 bendungan baru sejak 2015 terus berlangsung. Jika semua selesai dan beroperasi tahun 2022, cakupan pengairan sawah ditargetkan meningkat menjadi 20 persen dari total luas sawah di Indonesia.

Saat ini, luas total sawah irigasi di Indonesia mencapai 7,3 juta hektar. Namun, dengan 231 bendungan yang ada, luas sawah yang terairi air bendungan baru 11 persen atau sekitar 800.000 hektar saja.

"Dengan menambah bendungan baru, luas sawah teraliri air dari bendungan diharapkan bisa lebih dari 1,4 juta hektar," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang ditemui seusai Dies Natalies Ke-5 Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019).

Pembangunan bendungan ini untuk menggenjot produksi dan ketahanan pangan nasional. Dengan menambah bendungan, masalah kekeringan diupayakan tertangani.

"Juga mendorong agar sawah yang sebelumnya hanya bisa panen setahun sekali, bisa panen dua hingga tiga kali setahun," ujar Basuki.

Dengan menambah bendungan baru, luas sawah teraliri air dari bendungan diharapkan bisa lebih dari 1,4 juta hektar.

Pembangunan bendungan dimulai bertahap sejak 2015 dengan membangun 11 bendungan dan menyelesaikan 13 bendungan baru. Tahun ini dibangun 29 bendungan baru.

Satu bendungan dibangun dengan besaran ang-

garan APBN bervariasi, berkisar ratusan miliar rupiah. Paling mahal Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sekitar Rp 2 triliun.

Saat ini, sistem irigasi teknis yang ada tak otomatis menghindarkan areal sawah dari risiko kekeringan. Di Kabupaten Purworejo, awal Agustus 2018 ada lebih dari 800 hektar sawah berstatus irigasi teknis yang kekeringan dan gagal panen.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Purworejo Eko Anang Sofyan W mengatakan, kekeringan dan kegagalan panen karena debit semua sumber air, termasuk sumber air pemasok air irigasi, menyusut drastis.

Di Badung, Bali, pemerintah membangun bendungan berkapasitas 3,8 juta meter kubik. Bendungan Sidan itu direncanakan menambah pasokan air baku untuk Kota Denpasar dan sejumlah kabupaten, antara lain Badung, Gianyar, dan Tabanan atau Sarbagita serta Bangli.

Bendungan Sidan senilai Rp 830 miliar dibiayai APBN tahun jamak 2018-2021. "Untuk menambah ketahanan air di Bali," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi pada peresmian proyek.

Bendungan Sidan ada di daerah aliran Sungai Ayung. Lokasi tapak bendungan dan genangan ada di tiga kabupaten, yaitu Badung, Gianyar, dan Bangli. Luas lahan yang dibebaskan untuk bendungan itu 82,73 hektar. (EGI/COK)

Judul	Segmentasi Lelang Perketat Persaingan	Tanggal	Jumat, 5 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kalangan konsultan menilai pemberlakuan segmentasi baru dalam paket lelang jasa konsultasi di Kementerian PUPR bakal membuat persaingan kian ketat, terutama di kualifikasi menengah.		

► JASA KONSULTANSI

Segmentasi Lelang Perketat Persaingan

Bisnis, JAKARTA — Kalangan konsultan menilai pemberlakuan segmentasi baru dalam paket lelang jasa konsultasi di Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat bakal membuat persaingan kian ketat, terutama di kualifikasi menengah.

Wakil Ketua Bidang Pranata Usaha DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Jakarta Ronald Sihombing mengatakan bahwa segmentasi baru memicu peralihan kualifikasi besar ke menengah karena paket untuk kualifikasi besar menyempit.

"Situasi di lapangan banyak yang menurunkan *grade*-nya [ke menengah] sehingga persaingan menjadi keras," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (4/4).

Dalam pengadaan jasa konsultansi tahun anggaran 2019, Kementerian PUPR mengubah plafon paket yang bisa diikuti oleh badan usaha. Dalam Surat Edaran Menteri PUPR No. 10/SE/M/2018, segmentasi diubah menjadi kecil, menengah, dan besar dari sebelumnya kecil dan nonkecil.

Konsultan dengan kualifikasi kecil bisa mengikuti lelang dengan nilai di bawah Rp1 miliar, sedangkan nilai lelang di kisaran Rp1 miliar sampai dengan Rp2,50 miliar diperuntukkan bagi konsultan kualifikasi menengah.

Sementara itu, pekerjaan di atas Rp2,50 miliar menjadi pangsa konsultan besar.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, paket untuk kualifikasi kecil tahun ini tercatat 1.148 paket atau 42% dari total paket.

Kemudian, untuk kualifikasi menengah dan besar masing-masing 869 paket (32%) dan 727 paket (26%).

Sementara itu, berdasarkan nilai paket, kualifikasi besar mendominasi sebesar 78%, disusul menengah (15%), dan kecil (7%).

Ronald menerangkan bahwa tahun ini merupakan transisi pemberlakuan

segmentasi baru pada pengadaan jasa konsultasi.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri jika badan usaha kurang siap menggarap nilai paket yang lebih besar dari sebelumnya.

Menurutnya, ketidaksiapan ini antara lain disebabkan jumlah tenaga ahli yang terbatas.

Pelaku usaha, katanya, bisa memanfaatkan skema kerja sama operasi atau KSO untuk menggarap paket pekerjaan konsultasi dalam segmentasi yang baru. KSO bisa menjadi solusi karena pelaku usaha bisa berkolaborasi.

"Aturan ini kan memudahkan dunia usaha dan pasti ada masa transisi. Dengan begitu, nanti yang kecil bisa belajar naik [jadi menengah] dan menengah naik jadi besar. Yang besar pun tidak tergilas karena tetap ada peketnya [untuk kualifikasi besar]," jelas Ronald.

Sebelumnya, Ketua DPN Inkindo Peter Frans menyebutkan bahwa pengaturan segmentasi pada pelelangan jasa konsultansi sudah sesuai dengan komposisi badan usaha jasa konsultan yang mana didominasi kecil dan menengah sebesar 95%.

Sementara itu, jumlah badan usaha jasa konsultan kualifikasi besar hanya 5% dari populasi perusahaan konsultan.

"Jadi, sekarang lebih tertib, yang besar tidak bisa lagi ikut [kualifikasi] kecil dan menengah. Ini baru berlaku tahun ini dan nanti akan terbentuk keseimbangan baru," katanya, beberapa waktu lalu.

Data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) menunjukkan bahwa jumlah badan usaha jasa konsultan pada 2018 mencapai 8.210.

Dari jumlah tersebut, konsultan kecil mendominasi sebesar 6.890, disusul konsultan menengah dan besar masing-masing 935 dan 405. (Rivki Maulana)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jumat, 5 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Foto udara memperlihatkan deretan baru pemecah ombak di Pantai Padang, Sumatera Barat. Balai Wilayah Sungai Sumatra V Kementerian PUPR membangun batu pemecah ombak untuk mencegah abrasi di sejumlah pantai di provinsi itu diantaranya Kab. Agam, Padangpariaman, Kota Pariaman, dan Padang dengan anggaran senilai Rp69 miliar selama 2019.		

• BATU PEMECAH OMBAK



Antara/Iqbal el Fitra

Foto udara memperlihatkan deretan batu pemecah ombak di Pantai Padang, Sumatera Barat, Kamis (4/4). Balai Wilayah Sungai Sumatra V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun batu pemecah ombak untuk mencegah abrasi di sejumlah pantai di provinsi itu di antaranya Kab. Agam, Padangpariaman, Kota Pariaman, dan Padang dengan anggaran senilai Rp69 miliar selama 2019.

Judul	Tanggul Laut Tetap Dibangun di Palu	Tanggal	Jumat, 5 April 2019
Media	Kompas (Halaman, 15)		
Resume	Pemerintah bersikukuh membangun tanggul laut untuk mengantisipasi pasang laut dan tsunami di Teluk Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tanggul laut dinilai opsi terbaik melindungi pesisir, termasuk dari terjangan tsunami. Namun, sejumlah kalangan menolak rencana yang dinilai tak berbasis mitigasi itu.		

PASCABENCANA SULTENG

Tanggul Laut Tetap Dibangun di Palu

PALU, KOMPAS — Pemerintah bersikukuh membangun tanggul laut untuk mengantisipasi pasang laut dan tsunami di Teluk Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tanggul laut dinilai opsi terbaik melindungi pesisir, termasuk dari terjangan tsunami. Namun, sejumlah kalangan menolak rencana yang dinilai tak berbasis mitigasi itu.

"Tanggul berfungsi sebagai pelindung tebing teluk yang mengalami penurunan. Kami menata pesisir agar wilayah itu tetap bermanfaat, baik secara sosial maupun ekonomi," kata Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulteng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto di Palu, Kamis (4/4/2019).

Dalam rencana rekonstruksi pascagempa Sulteng, tanggul laut dibangun sepanjang 7 kilometer di pesisir Teluk Palu, tepatnya dari Kelurahan Silae hingga Kelurahan Talise. Tingginya bervariasi, 1,5-3 meter. Tanggul tersebut dibangun dari batu. Belum bisa dipastikan kapan tanggul itu dibangun, tetapi diperkirakan dimulai 2019 ini.

Di sisi tanggul akan ditanam pepohonan sebagai ruang terbuka hijau. Infrastruktur itu dikombinasi dengan jalan raya untuk logistik dan wisata teluk. Lebar jalan sekitar 7 meter dengan konstruksi agak tinggi. Jalan itu juga berfungsi sebagai

"tanggul" kedua untuk meredam energi tsunami.

Pada tsunami 28 September 2018, wilayah pesisir Teluk Palu luluh lantak. Jangkauan tsunami ke darat dari 50 hingga 200 meter. Mengacu pada kejadian itu, titik terjauh jangkauan tsunami ditetapkan sebagai zona terlarang untuk pembangunan rumah ataupun bangunan komersial. Saat ini, begitu pasang, air laut menjangkau darat hingga 100 meter.

Sekretaris Jenderal Pasigala Centre, Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Pengawasan Pascabencana Sulteng, Andika mengingatkan, tsunami lalu menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengembalikan kawasan pesisir sebagai zona konservasi dengan penanaman mangrove. Dengan langkah itu, kawasan pesisir menjadi pelindung daratan dari tsunami dan abrasi, ekowisata, serta rumah bagi biota laut. Mitigasi dengan menanam mangrove dinilai lebih lengkap daripada tanggul laut.

Merujuk pada hutan mangrove di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saat tsunami lalu, rumah-rumah warga yang ditutup mangrove tidak mengalami kerusakan. Di RW 002, misalnya, ada rumah warga yang berjarak hanya 5 meter dari bibir pantai. Namun, karena mangrove cukup lebar,

rumah itu tidak hancur. Hal berbeda terjadi di RW 001. Sejumlah rumah hancur karena hutan mangrove di sekitarnya tipis.

Menanggapi hal itu, Arie menyatakan, kondisi pesisir Teluk Palu tak memungkinkan ditanami mangrove. Hal ini karena teluk itu tidak memiliki pantai yang landai, tetapi langsung laut dalam.

"Tsunami memang tetap akan melampau tanggul dan jalan yang dibangun, tetapi energinya bisa diredam," kata Arie.

(VDL)

hadirilah..

Pameran

PAMERAN Sepat Kulit & Fashion Terbaik

Menampilkan : • Teknologi • Bahan • P
• Tekstil & Apparel • Sepatu & Sarung K

ILF

ILF - INDO LEATHER & FOOTWEAR EXPO

SHOE & LEATHER FASHION Festival

www.indoleatherfootwear.com

Judul	Jawa Barat Tunggu Peraturan Presiden	Tanggal	Jumat, 5 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 8)		
Resume	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat Linda Al Amin mengatakan, dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu Kantor Staf Kepresidenan (KSP) diputuskan urusan penuntasan masalah sosial ini harus diselesaikan dengan Perpres.		

► WADUK KUNINGAN

Jawa Barat Tunggu Peraturan Presiden

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah berencana mengeluarkan peraturan presiden yang khusus mengatur pemberian ganti rugi bagi warga terdampak proyek Waduk Kuningan.

redaksi@bisnis.com

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat Linda Al Amin mengatakan, dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu Kantor Staf Kepresidenan (KSP) diputuskan urusan penuntasan masalah sosial ini harus diselesaikan dengan Perpres.

"Solusinya ditarik ke atas, karena sesuai aturan karena tidak mungkin [ganti rugi] dibayar dua kali. Karena mencontoh sukses di Jatigede ditarik jadi perpres," katanya di Bandung, Kamis (4/4).

Menurutnya, persoalan di Waduk Kuningan adalah setelah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung memberikan ganti rugi pada warga terdampak, Pemkab Kuningan mengajukan permohonan relokasi bagi warga yang tidak terdampak.

"Kabupaten Kuningan ingin memenuhi tuntutan masyarakat [soal relokasi] tetapi di APBN tidak bisa dipenuhi karena akan terjadi double counting. Sekarang Perpres masih di staf presiden mudah-mudahan bisa selesai cepat," ujarnya.

Sebetulnya, pihak BBWS, menurut Linda, sudah siap memenuhi permintaan tersebut mengingat dana untuk relokasi sekitar 50 kepala keluarga sudah tersedia.

"Masyarakat sudah siap dan uangnya sudah ada, karena belum ada aturan hukum yang memayungi jadi belum bisa [dicairkan]," katanya.

► Perpres diharapkan segera turun mengingat secara fisik pembangunan Waduk Kuningan hampir selesai.

► Bendungan yang menelan biaya Rp491 miliar tersebut saat ini perkembangan fisiknya hingga akhir Januari sudah mencapai 95,77%.

Dia berharap agar Perpres segera turun mengingat secara fisik Waduk Kuningan sudah hampir selesai.

Namun, urusan masalah sosial harus dituntaskan agar saat diresmikan waduk ini tidak mendapatkan ganjalan. "Posisi konstruk-

si bendungan sudah tinggal daerah genangan. Kalau itu sudah selesai bisa langsung digenangi, itu sudah selesai semuanya tinggal masalah sosial," ungkapnya.

PROYEK STRATEGIS

Di tempat yang sama, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Eddy M. Nasution mengatakan, Waduk Kuningan merupakan satu dari tujuh waduk yang masuk dalam proyek strategis nasional yang bisa diresmikan pada tahun ini. "Namun memang ada masyarakat desa lain yang tidak dibebaskan menuntut hal yang sama," paparnya.

Menurutnya, belajar dari penyelesaian masalah sosial di Waduk Jatigede, untuk urusan pemberian ganti rugi untuk kasus di Waduk Kuningan harus memiliki payung hukum yang kuat seperti Perpres. "Hanya Waduk Kuningan yang masih memiliki masalah, yang lain tidak ada persoalan," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Kariwa mengatakan, bendungan yang menelan biaya Rp491 miliar tersebut saat ini perkembangan fisiknya hingga akhir Janua-

ri sudah mencapai 95,77%. Namun pembebasan lahan di tujuh desa di Kecamatan Cibeureum, Kuningan baru mencapai 141,79 hektare atau 80,88% dari target.

"Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan bagian masyarakat, pindahnya ingin sekaligus satu desa," katanya.

Menurutnya, ada ratusan kepala keluarga di Desa Kawungsari yang tidak masuk dalam wilayah genangan ingin ikut dibebaskan bersama rukun tetangga lainnya.

Jika warga di dua RT tersebut tidak dibebaskan, pada saat penggenangan dipastikan akan terisolasi. "Biayanya jauh lebih besar karena sarana prasarana harus disiapkan," ujarnya.

Warga yang menempati kawasan seluas 4,81 hektare tersebut menuntut pembebasan seluruhnya.

Adapun, dari sisi aturan lokasinya tidak masuk dalam dokumen penetapan lokasi yang menjadi dasar pembebasan lahan.

Jika anggaran APBD maupun APBN dipaksakan untuk membebaskan maka potensi pelanggaran dan duplikasi dikhawatirkan terjadi. (KSP)



Sumber: BBWS Cimanuk-Cisanggarung, 2019

Lokasi	: Sungai Cikaro, Cibeureum, Kuningan
Biaya Konstruksi	: Rp491,4 miliar
Volume Tampung	: 25,95 juta meter kubik
Air Baku	: 300 liter/detik
Irigasi	: 3.000 hektare [melayani Kuningan dan Brebes, Jawa Tengah]
Fisik	: 95,77% [akhir Januari 2019]
Lahan	: 88,35% dari 292,71 hektare

BISNIS/AYAN INDRIYANA